BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila

a. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosa kata dalam bahasa Inggris yaitu *democracy*. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik, hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini menjadi indikator perkembangan politik suatu negara. Menurut Ubaedilah dkk (2011:36) demokrasi secara *etiologis* berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti kekuasaan atau kedaulatan, suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemerintahan selalu melibatkan dan mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan keputusan serta warga negara juga dapat memilih calon pemimpin yang berasal dari rakyat dengan tujuan untuk kepentingan rakyat.

Demokrasi berpusat pada masyarakat dengan mengutamakan aspek partisipasi masyarakat. Partisipasi tidak hanya dalam bentuk keterlibatan langsung masyarakat secara berkala pada pemilihan umum, tetapi terhadap *voice*, akses dan kontrol masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah sehari-hari.

Demokrasi memiliki nilai-nilai yang sangat diperlukan dalam kehidupan sebagai acuan untuk menata kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cholisin (2013:19) berpendapat bahwa demokrasi dianggap sangat penting

dikarenakan sebagai alat yang diperlukan untuk mewujudkan *good society and good goverment* yang berarti sebagai pemerintahan atau masyarakat yang baik.

Menurut pendapat Isakhan & Stockwell (2011:442) demokrasi pada suatu negara akan dikatakan baik jika demokrasi tersebut tidak bergantung hanya pada struktur pemerintahan dan politik, tetapi akan jauh lebih efektif jika bergantung pada orientasi rakyat terhadap proses politik dan kebudayaan politik. Masyarakat berpegang teguh pada cita-cita bangsa dan negara, serta dalam sebuah demokrasi pulalah kesempatan masyarakat sebagai warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebebasan secara maksimum. Melalui cara pandang mengenai demokrasi juga membantu dalam memahami bahwa demokrasi merupakan sebuah entitas yang dinamin dengan berbagai definisi yang berbeda-beda.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpilkan bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem yang memberikan ruang pada setiap warga negara untuk membuat kesepakatan-kesepakatan politik yang akan dijalankan oleh warga negara itu sendiri dalam bentuk mendapatkan hak melalui wakil rakyat yang telah dipilih secara langsung, dikarenakan rakyat dalam hal ini memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi tersebut.

Menurut pendapat Munck (2014:21) demokrasi merupakan suatu kebebasan dan kesetaraan politik yang membuka keterlibatan warga negara yang memiliki peranan penting untuk terlibat langsung dalam kebijakan. Selain itu demokrasi memiliki beberapa peran di beberapa bidang di antaranya ialah pengambilan keputusan pemerintah dimana lembaga politik yang demokratis mayoritas adalah warga negara yang dapat merubah keadaan pemerintahan yang sedang berlangsung.

Lingkungan sosial politik, di mana konteks sosial tidak dapat merubah prinsip-prinsip kebebasan politik dan kesetaraan hanya menjadi formalitas belaka.

Namun begitu kualitas demokrasi pada saat ini masih pada konsep proses implementasi keputusan pemerintah dan hasil dari proses politik. Artinya keputusan dan hasil poses politik tersebut dapat mencerminkan kulitas demokrasi yang baik atau pun gagal. Kurangnya partisipasi suatu warga negara menggambarkan bahwa kurangnya pemahaman dan pelaksanaan kebijakan yang kurang berdampak terhadap warga negara itu sendiri, sehingga masyarakat kurang tertarik untuk turut serta terlibat dalam proses politik itu sendiri.

Menurut Duharte (2010:51) demokrasi dapat diartikan sebagai proses perubahan politik yang lebih luas dan beragam. Demokrasi juga dianggap dapat mendorong masyarakat dalam masa perubahan politik. Sistem pemerintahan yang dapat menjamin kekuasaan sehingga demokrasi dianggap sebagai sarana untuk memandu semua sektor sosial seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya. Hal ini dikarenakan demokrasi tidak hanya sebatas pada proses pemilihan saja, namun demokrasi dapat mencakup segala bidang di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Fuchs & Roller (2018:22–32) bahwa demokrasi akan dikatakan berhasil ataupun efektif terutama pada transisi sosialisme, apa bila demokrasi tersebut terus meningkat. Di mana keputusan politik disahkan melalui partisipasi masyarakat yang afektif dalam keputusan politik, sehingga demokrasi dapat memenuhi segala kebutuhan dasar rasional individu itu sendiri.

Selain itu budaya demokrasi menurut Hadley & Belfiore (2018:218-222) merupakan penyatuan para akademisi, praktisi dan akademisi yang mewakili

masyakat untuk mengkosptualisasikan kembali konsep demokrasi. Hal ini dikarenan perlu adanya relevansi demokrasi dan kebijakan budaya, dengan memulai belajar dari pemahaman sejarah demokrasi budaya itu sendiri. Sehingga budaya demokrasi menjadi sarana penting dalam memperkenalkan pemahaman kepada semua orang.

Demokrasi partisipatif ini dapat terlihat pada sebuah koalisi organisasi, kelompok maupun individu dimana mereka bebas dalam mengusulkan ide, mempertimbangkan keputusan dimana hal tersebut merupakan hak semua orang. Dengan memahami budaya demokrasi dapat memberikan kemampuan kepada semua orang untuk dapat terlibat lebih dalam kegiatan politik. Menurut pendapat Landman (2018:48-59) untuk mengubah sifat demokrasi dalam masyarakat perlu adanya upaya demokratisasi yang lebih luas dari berbagai aspek kehidupan, baik itu politik, ekonomi, dan kelembagaan. Sehingga hal tersebut dapat mendorong semua orang untuk dapat terlibat langsung dalam memperjuangkan hak mereka sebagai warga negara.

Hal ini sejalan dengan pendapat Manski (2015:3:15) bahwa demokrasi menurut merupakan suatu gerakan yang dapat menggabungkan berbagai unsur masyarakat yang berbeda-beda. Menuntut warga negara untuk memiliki kemampuan dan kemauan serta tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai tujuan dan bukan hanya sekedar sarana.

Jadi melalui gerakan tersebut dapat memberikan pengalaman serta pengetahuan kepada masyarakat untuk lebih aktif dalam berdemokrasi, hal ini didukung oleh pendapat Camacho (2019:15) bahwa pengalaman demokrasi juga

dapat mempengaruhi bentuk dukungan demokrasi secara lebih afektif sehingga membuat warga negara dapat memahami dan menilai bahwa sistem demokrasi secara independen dapat mendukung kinerja pemerintah terutama pada bidang politik, melalui pengalaman dan proses pembelajaran ini terjadi ketika individu tersebut mengalami demokrasi.

Schmitt (2015:18-37) juga berpendapat bahwa setiap warga negara harus turut serta berpartisipasi dalam mengambil segala keputusan yang berpengaruh langsung terhadap warga negara itu sendiri. Kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam sebuah keputusan menjadikan setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menetukan keputusan. Namun menurut Schmitt demokrasi juga tidak hanya sebatas keikutsertaan warga negara dalam mengambil keputusan, namun lebih kepada demokrasi sosial. Hal tersebut memerlukan kondisi latar belakang solidaritas karena masa depan utama demokrasi tidak hanya sebatas partisipasi akan tetapi lebih kepada ikatan solidaritas yang lebih kuat antar warga negara. Karena demokrasi merupakan kesepakatan diantara warga negara yang di tuntut oleh demokrasi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Thompson (2018:161) bahwa demokrasi merupakan suatu konsep yang mengedepankan kesetaraan seluruh warga negara, di mana setiap individu dapat berpartisipasi dalam mengambil dan menentukan keputusan secara bersama-sama. Selain itu demokrasi juga akan tercipta ketika masyarakat dikendalikan oleh mayoritas populasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan praktik kebebasan warga negara dalam bidang politik dengan

bentuk ikut serta dalam berpartisipasi baik secara langsung maupun perwakilan guna memenuhi kebutuhan warga negara itu sendiri.

b. Prinsip-prinsip Demokrasi

Suatu pemerintahan dinilai demokrasi apabila di dalam mekanisme pemerintahan dapat mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu prinsip-prinsip demokrasi di dalam suatu negara menjadi tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam menerapkan sistem demokrasi. Untuk tercapainya prinsip-prinsip demokrasi tersebut diperlukannya pendidikan demokrasi bagi seluruh individu sebagai warga negara. Adapun prinsip-prinsip demokrasi menurut Syafiie (2012:17)

a. Adanya pembagian kekuasaan

   Pembagian kekuasaan di dalam suatu negara berdasarkan prinsip demokrasi. Menurut pendaat John Locke kekuasaan terbagi menjadi 3 atau trias politica, yaitu: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga lembaga ini memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat untuk saling menguasai.

b. Pemilihan umum yang bebas

   Kedaulatan tertinggi di dalam suatu negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun kedaulatan tersebut tidak dapat di lakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan menjasi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat di dalam embaga legislatif. Untuk menentukan wakil rakyat, dapat dilakukan dengan pemilihan umum. Di dalam pelaksanaannya, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Selain pemilihan wakil rakyat, pada memilihan umum warga negara juga memilih presiden, wakil

presiden. Hal ini dikarenakan warga negara memiliki kebebasan untuk memilih pemimin negara dan tidak dibenarkan jika adanya pemaksaan pilihan di dalam negara demokrasi

c. Manajemen yang terbuka

Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut juga terwujud apabila pemerintah dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayana kemasyarakatan di hadapan rakyat.

d. Kebebasan individu

Di dalam sebuah demokrasi, negara harus dapat menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang. Misalnya kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan lain sebagainya. Namun tentunya, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggng jawab. Oleh karena itu, kebebasan seseorang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan begitu setiap mayarakat dapat melakukan kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak merugikan kepentingan orang lain.

e. Peradilan yang bebas

Melalui pembagin kekuasaan, lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi lembaga negara yang lain. Di dalam praktik kenegaraan, hukum berada di dalam kedaulatan tertinggi.

f. Pemerintahan berdasarkan hukum

Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Hukum menjadi instrumrn untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

g. Beberapa partai politik

Partai politik menjadi wadah bagi setiap warga negara untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai dengan pilihan hati nuraninya. Maka dari itu, negara memberikan kebebasan bagi semua warga negara untuk mendidikan partai politik. namun pendirian partai politik tentunya harus sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu warga negara juga tidak diperbolehkan untuk mendirikan partai dengan asas maupun ideologi yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut Robert A. Dahl (2007: 54) terdapat 6 prinsip dalam demokrasi yaitu:

a) Adanya kontrol atau kendali atas pemerintahan. Kabinet dan pemerintah daerah bertugas melaksanakan pemerintahan berdasar mandat yang diperoleh dari pemilu. Namun demikian dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah bukan bekerja tanpa batas, pemerintah dalam mengambil keputusan masih dikontrol oleh lembaga legislative yaitu DPR dan DPRD. Di Indonesia control tersebut terlihat dari keterlibatan DPR dalam penyusunan anggaran, penyusunan peraturan perundangan, dan melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk pengangkatan pejabat Negara yang dilakukan oleh pemerintah.
b) Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dari warga Negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur . suatu keputusan tentang apa yang dipilih

didsarkan pengetahuan warganegara yang cukup dan informasi yang akurat dan dilakukan dengan jujur.

c) Adanya hak dipilih dan memilih. Demokrasi berjalan apabila setiap warga Negara mendapatkan hak pilih dan dipilih. Hak memilihuntuk memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintahan, serta memutuskan pilihan terbaik untuk memutuskan pilihan yang terbaik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai rakyat. Hak dipilih memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara yang mempunyai kemampuan dan kemauan serta memenuhi persyaratan untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya.

d) Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, berserikat dengan rasa aman.Apabila warga Negara tidak dapat menyampaikan pendapat atau kritik dengan lugas, maka saluran aspirasi akan tersendat, dan pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik.

e) Adanya kebebasan mengakses informasi. Demokrasi membutuhkan informasi yang akurat, untuk itu setiap warga Negara harus mendapat akses informasi yang memadai. Keputusan pemerintah harus disosialisasikan dan mendapat persetujuan DPR, serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar. Selain DPR dan juga rakyat dapat juga mencari informasi. Sehingga antara pemerintah dan DPR mempunyai informasi yang akurat dan memadai.

Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan untuk berserikat ini memberikan dorongan bagi warga Negara yang merasa lemah, dan untuk

memperkuatnya membutuhkan teman atau kelompok dalam bentuk serikat. Adanya serikat pekerja, terbukanya system politik memungkinkan rakyat memberikan aspirasi secara terbuka dan lebih baik. Selain prinsip-prinsip demokrasi yang dikenal secara universal, di Indonesia mengenal prinsip demokrasi pancasila. Di mana demokrasi pancasila merupakan suatu paham demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian rakyat Indonesia sendiri.

c. Ciri-Ciri Demokrasi

Ada berbagai macam istilah, seperti demokrasi konstitusional, demokrasi perlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Menurut Yudi Latif (2012:475) demokrasi tidak hanya sebagai alat teknis melainkan cerminan alam kejiwaan, dan cita-cita nasional.

Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan kepada warga negara dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupan warga negara itu sendiri. Warga negara diharuskan untuk dapat aktif berpartisipasi dan bertindak untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan di dalam demokrasi rakyat sebagai warga negara yang memegang kekuasaan tertinggi, oleh karena itu setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Menurut pendapat Zagrebina (2019:160) di dalam demokrasi terkandung nilai-nilai yang meliputi kebebasan, hak-hak individu, tujuan bersama dan keadilan.

Nilai-nilai ini tidak terlepas dari konteks masyrakat yang dapat membentuk sikap serta budaya yang diperlukan oleh setiap warga negara.

d. Nilai-nilai Demokrasi

Menurut Rukiyati dkk (2016:64) di dalam kehidupannya, manusia selalu terhubung dengan nilai serta menilai dan dinilai. Menilai diartikan sebagai kegiatan yang terhubung dengan sesuatu hal lain yang kemudian diberikan penilaian untuk mengambil keputusan. Keputusan yang telah ditentukan dapat dianggap sesuatu yang berguna, baik atau buruk serta benar atau salah.

Rukiyati dkk juga berpendapat suatu negara yang sudah menggunakan sistem pemerintahan demokrasi akan terwujud apabila didalam kehidupan masyarakat terkandung nilai-nilai demokrasi yang memiliki ciri-ciri diantaranya: 1) toleransi; 2) bebas mengemukakan pendapat dan menghormati pendapat orang lain; 3) memahami keanekaragaman dalam masyarakat; 4) terbuka dalam komunikasi; 5) menjunjung nilai-nilai kemanusiaan; 6) percaya diri serta mandiri; 7) saling menghargai; 8) mampu mengekang; 9) kebersamaan; 10) keseimbangan.

Menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai demokrasi merupakan segala sesuatu yang berguna bagi masyarakat demi mewujudkan kehidupan yang demokratis. Nilai-nilai demokrasi yang berkembang dengan baik akan dapat mewujudkan masyarakat yang demokratis. Oleh sebab itu nilai-nilai demokrasi ini perlu diterapkan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman. Hal ini bertujuan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang damai. Pemahaman nilai-nilai demokrasi di dalam penelitian ini dibatasi pada: 1) kebebasan; 2) kebersamaan; 3) menghormati keberagaman; 4) ikut

berpartisipasi di dalam politik. Oleh karena itu, berikut penjelasan mengenai nilai-nilai demokrasi:

1. Kebebasan, di dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat 2 dan 3, serta psal 28 I ayat 2. Pasal 28 E ayat 2 memberikan jaminan kepada setiap orang untuk bebas dan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, sedangkan pada ayat 3 memberikan jaminan atas kebebasan berserikat, bekumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28 I ayat 2 menjamin setiap orang untuk bebas dari diskriminatif dan mendapat perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Untuk itu setiap masyarakat memiliki kewajiban dan hak yang sama di mata hukum. Seperti menggunakan hak kebebasan, masyarakat tidak perlu merasa takut atau khawatir karena mendapat perlindungan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendapat Doorenspleet (2012:93) bahwa kebebasan dianggap sebagai sarana untuk menuju kemajuan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga masyarakat berperan secara maksimal sebagai warga negara tanpa adanya batasan dari pemerintah atau penguasa politik. Oleh karena itu demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan perlindungan pada kebebasan setiap masyarakat sebagai warga negara dan memberikan tugas kepada pemerintah untuk memberikan jaminan atas kebebasan tersebut.

Menurut Cholisin (2013:26) menurutnya kebebasan, kemerdekaan dan hak sering digunakan dalam pengertian, karena ketiga hal tersebut mengacu pada kemampuan untuk bertindak tanpa pembatasan. Untuk itu menurut Cholisin hak-hak sipil diantaranya mencakup a) hak untuk memilik atau memberikan suara; b) kebebasan berbicara; c) kebebasan beragama; d) kebebasan bergerak; e) kebebasan

berkumpul; serta f) kebebasan dari perilaku sewenang-wenang oleh sistem politik atauun hukum.

Sedangkan menurut pendapat Sunarso (2013:80) jaminan yang diberikan demokrasi kepada masyarakat diantaranya adala: a) kebebasan berpendapat; b) kebebasan pers; c) kebebasan mendirikan dan menjadi anggota organisasi yang dijamin menjadi saluran partisipasi dan berkompetisi. Kebebasan tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Hal disebabkan karena setiap masyarakat mendapat jaminan dari pemerintah, untuk secara bebas dapat menentukan pilihan dan memilih suatu hal yang dianggap baik bagi kehidupan mereka.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebebasan merupakan hak dari setiap masyarakat sebagai warga negara untuk bebas dalam menentukan kehidupannya. Kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat memiliki cakupan yang luas, salah satu diantaranya adalah kebebasan untuk menentukan suatu hal yang akan dipilih. Hal ini di dasari oleh UUD 1945 pasal 28 E ayat 2 dan 3 serta pasal 28 I ayat 2. Adapun nilai kebebasan tersebut diantaranya kebebasan dalam berkumpul dan berserikat, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Pemahaman nilai-nilai demokrasi yang dimiliki siswa meliputi arti kebebasan, memahami aspek kebebasan hak sipil dan memahami contoh dari nilai kebebasan.

2. Kebersamaan atau *solidarity*, merupakan salah satu nilai-nilai demokrasi di dalam masyarakat. Kebersamaan dianggap hal penting di dalam kehidupan bermasyarakat dikarenakan kehidupan masyarakat penuh dengan dinamika

kehidupan, seperti timbulnya masalah-masalah ditengah kehidupan bermasyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka bebersamaan atau solidaritas berperan penting untuk menjaga kesatuan dan keharmonisan kehidupan masyarakat. Menurut Zamroni (2013:31) keterampilan yang diperlukan masyarakat untuk bisa bekerjasama dan miliki keterampilan meliputi: keterampilan dalam menyampaikan ide, keterampilan mendengaran ide orang lain dan memberikan tanggapan dengan baik, dan keterampilan dalam mengambil keputusan.

Menurut Kneuer (2016:75) demokrasi memerlukan kerjasama antara warga masyarakat satu dengan yang lainnya untuk terlibat langsung mengambil keputusan yang disepakati oleh semua pihak. Sebab jika masyarakat memiliki rasa curiga kepada masyarakat lainnya akan mengakibatkan demokrasi tidak berjalan dengan baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebersamaan atau *solidaitas* merupakan salah satu nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi yang terdapat di kehidupan mayarakat. Nilai kebersaaman seperti rasa senasib sepenanggungan memotivasi masyarakat untuk bekerjasama untuk menyelesaikan masalah, adanya ketelibatan langsung dalam pengambilan keputusan oleh masyarakat. Oleh sebab itu kebersamaan setiap masyarakat perlu dijaga dengan baik agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis.

3. Menghormati keanekaragaman (*plurality*), berbagai macam perbedaan terdapat di Indonesia. Jumlah penduduk yang besar menjadi salah satu faktor Indonesia memiliki keanekaragaman. Menurut pendapat Srijanti dkk (2013:49) di dalam kehidupan demokratis, perlu adanya kesadaran setiap masyarakat untuk saling

menghargai perbedaan diantaranya, etnis, budaya, bahasa, agama dan lain sebagainya. Saling menghormati satu sama lain merupakan salah satu nilai-nilai demokrasi yang diakui oleh sistem politik demokrasi. Hal tersebut mengandung makna bahwa demokrasi juga memerlukan sikap toleransi, menghargai, menghormati satu sama lainnya, komunikasi dan kerjasama setiap masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Zamroni (2007:77) bahwa suatu masyarakat yang memiliki keanekaragaman, baik itu suku, ras, agama dan status sosial, mereka harus dapat tetap menjalin kerjasama. Saling tergantung satu dengan yang lainnya, dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegra dengan fokus masyarakat saling bekerjasama sebagai pemersatu bangsa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi perpecahan dan keanekaragaman diperlukannya sebuah demokrasi sebagai solusi terbaik. Nilai-nilai saling menghormati keanekaragaman ditandai dengan adanya kesadaran perbedaan sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain serta menghormati segala perbedaan. Untuk itu perlu adanya pemahaman mengenai keanekaragaman, memahami manfaat keanekaragaman serta memahami cara menyikapi perbedaan yang ada.

4. Ikut berpatisipasi dalam politik, menjadi salah satu faktor terpenting di dalam demokrasi. Keikutsertaan masyarakat dalam pesta demokrasi seperti pemilihan umum, merupakan salah satu kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan aspirasinya dengan turut serta memilih pemimpin. Oleh sebab itu pastiripasi masyarakat dalam pelaksanaannya menjadi hal yang sangat penting karena dapat berpengaruh terhadap mengambil dan menentukan keputusan. Menurut pendapat

Zamroni (2013:15) partisipasi merupakan salah satu kegiatan politik yang terdiri dari partisipan dan non partisipan. Kegiatan politik partisipan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan partai politik untuk mendapatkan kekuasaan. Selain itu kegiatan partisipasi politik dapat dilakukan dengan ikut serta dalam memberikan suara pada pemilihan umum. Sedangkan patisipasi non partisipan merupakan kegiatan yang tidak terkait dengan kegiatan partai politik, dengan tujuan hanya untuk kebaikan masyarakat. Sunarso dkk (2013:103) juga berpendapat bahwa pemilihan umum merupkan sarana bagi demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Melalui pemilihan umum memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menentukan pilihan, memilih anggota yang akan menjabat di lembaga perwakilan rakyat. Pemelihan umum juga dilakukan secara demokratis dan transparan berdasarkan asas langsung, umum, jujur, bebas, rahasia dan adil. Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat terutama dalam pergantian pemimpin merupakan hak setiap masyarakat sebagai warga negara, untuk memilih pemimpin yang akan menjadi wakil rakyat

e. Keterkaitan PKn dengan Pemahaman Materi Demokrasi

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang memberikan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh sebab itu pendidikan kewarganegaraan dapat diterapkan di dalam pembelajaran disetiap jenjang pendidikan agar dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkompeten. Menurut pendapat Soemantri (2001:154) pendidikan kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang membekali siswa dengan

pengetahuan dan kemampuan dasar yang berhubungan dengan peran warga negara serta pendidikan bela negara agar dapat menjadi warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air dan dapat diandalkan. Selain itu Manning & Edwards (2013:13) juga berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan berefek baik bagi partisipasi politik siswa. Melalui pendidikan kewarganegraan siswa dapat mengekspresikan pandangannya melalui pemilihan sehingga dapat berefek langsung terhadap tingkat partisipasi politik. Oleh sebab itu pedidikan kewarganegaraan memeberikan efek positif pada partisipasi politik siswa.

Selain itu menurut pendapat Print (2012:7-19) untuk membentuk kewarganegaraan yang aktif dan demokratis faktor terpenting yang diperlukan ialah peran individu sebagai warga negara. Selain itu peran pendidikan juga berperan dalam memberikan pengetahuan dan konsep kewarganegaraan sehingga individu sadar akan pentingnya budaya politik demokratis di laksanakan oleh individu sebagai warga negara. Peran sekolah dalam memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada individu sebagai warga negara yang aktif. Ada dua faktor keterkaitan antara kewarganegaraan dengan pendidikan *pertama*, kewrganegaraan sebagai jaminan hak atas pendidikan, *kedua*, pendidikan sebagai sarana warga negara untuk bertindak secara efektif. Menurutnya Evans (2012:67) melalui pendidikan memberi kesempatan kepada individu menemukan inisiatif dan ide-ide politik untuk mewujudkan pemikiran dan pandanganya salah satunya melalui diskusi politik. Hal ini dikarenakan setiap individu sebagai warga negara memiliki kesempatan untuk memutuskan tindakan politik secara nyata. Oleh karena itu

demokrasi memerlukan warga negara yang dapat berfikiran terbuka, memiliki rasa solidaritas dan kesetaraan sosial.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan menumbuhkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran individu sebagai warga negara, memiliki sikap dan perilaku sebagai generasi penerus bangsa yang berwawasan nusantara serta berperilaku cinta tanah air. Selain itu pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu yang bertanggung jawab, produktif sehingga terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi sertiap warga negara. Siswa dapat berperan untuk menentukan kelangsungan hidup dimasa yang akan datang. Siswa merupakan salah satu bagian dari warga negara. Siswa sebagai warga negara muda dan sebagai calon pemilih pemula, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi salah satu faktor pendukung yang membantu siswa untuk memiliki kemampuan akademik dan pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaan dapat memberikan pemahaman, serta nilai-nilai demokrasi sehingga siswa dapat berperan aktif dalam masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis.

Siswa sebagai pemilih pemula harus memiliki pengetahuan dan nilai-nilai demokratis sehingga dapat menerapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut pendpaat Zamroni (2013:168) kehidupan demokratis tidak hanya sekedar teori yang ada di dalam pelajaran namun dapat dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat berperan langsung di dalam kehidupn bermasyarakat sebagai warga negara yang demokratis yang memiliki tanggung jawab pada limgkungan masyarakat disekitarnya. Hal ini didukung oleh pendapat Alexander,

et.al (2011:108) bahwa pengalaman demokrasi sangat penting bagi setiap warga negara terutama pada siswa sebagai warga negara muda. Untuk itu sangat perlu memberikan pemahaman mereka tentang demokrasi itu sendiri. Sehingga setiap warga negara demokratis secara bersama-sama dapat mewujudkan keinginan, mengutarakan pendapat serta memberikan pandangan mereka melalui partisipasi politik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki keterkaitan dengan pemahaman demokrasi, yaitu melalui materi demokrasi di dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan diantaranya memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada siswa untuk dapat berkembang menjadi warga negara yang demokratis. Warga negara yang demokrtis dapat dilihat dari nilai-nilai demokrasi yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk itu pendidikan kewarganegaraan dianggap penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aktif sebagai warga negara dan juga demokratis. Sejalan dengan pendapat pendapat Waghid & Davids (2015:2) menurutnya pendidikan kewarganegaraan demokratis telah muncul sebagai konsep yang memiliki potensi untuk meningkatkan keterlibatan dalam pelaksanaan demokrasi, selain itu pendidikan kewarganegaraan demokratis juga sudah menjadi bagian yang melekat pada negara yang memiliki sistem demokrasi. Penelitian mengenai pemahaman materi demokrasi ini di tujukan kepada siswa sebagai pemilih pemula. Siswa sebagai warga negara muda diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional, untuk itu siswa perlu memiliki kemampuan dalam memahami nilai-nilai demokrasi.

Sehingga dapat berperan serta dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis. Warga negara yang demokratis dapat dilihat dari nilai-nilai demokrasi yang deterapkan dalam kehidupan sehari-hari individu itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman materi demokrasi berperan penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis

1. Tujuan PKn

Pendidikan kewarganegaraan di lingkungan persekolahan memiliki tujuan untuk mempersiapkan siswa sebagai sebagai warga negara, generasi penerus bangsa yang baik dan cerdas. Warga negara yang memiliki pengetahuan (*knowledge*), sikap dan nilai (*attitudes and values*) serta keterampilan (*skill*) dengan tujuan agar dapat mewujudkan dan mengimplementasikan nilai-nilai dan tumbuh menjadi warga negara yang demokratis.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, agar peserta didik memilki kemampuan sebagai berikut:

1) Berfikir kritis, resional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2) Dapat berpatisipasi secara aktif serta memiliki tanggung jawab dan dapat bertindak secara cerdas di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti-korupsi.
3) Berkembang secara positif dan demokratis, bersikap berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup secara berdampingan dengan bangsa-bangsa lain.

4) Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dan tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut pendapat Cholisin (2004:9) pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan dengan materi pokok adalah demokrasi politik. Dengan tujuan untuk membina warga negara yang lebih baik sesuai dengan ketentuan konstitusi. Hal ini sejalan dengan pendapat Ngozwana (2017:13-14) pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang berintikan pendidikan demokrasi politik, yang didukung oleh sumber-sumber pengetahuan lainnya seperti, *positif influence* pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, dengan tujuan untuk melatih siswa untuk dapat berfikir kritis dan bertindak demokratis. Selain itu pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan keterampilan dan potensi masyarakat untuk dapat terlibat langsung di dalam partisipasi sebagai warga negara. Oleh karena itu pendekatan melalui pendidikan kewarganegaraan dapat melengkapi dan memberdayakan siswa sebagai warga negara untuk selalu berpartisipasi dalam proses demokrasi itu sendiri.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan untuk menciptakan warga negara yang normatif, serta menjadikan warga negara yang lebih kritis dan analitis sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif di dalam masyarakat. Oleh sebab itu sangat penting untuk mengembangkan pembelajaran kewarganegaraan untuk mengoptimalkan peran warga negara sebagaimana mestinya.

Menurut pendapat Waghid & Davids (2015:254) pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan demokratis memiliki tujuan; pertama, untuk mendorong orang agar tidak mengulangi politik *apartheid* yang rasis, membatasi kebebasan, dan otoriter. Kedua, untuk menghasilkan musyawarah publik untuk memastikan bahwa semua orang dapat terhubung dalam sebuah perserikatan dan mengemukakan aspirasinya secara demokratis. Ketiga, untuk mengakui hak dan tanggung jawab semua warga negara untuk menegakkan supremasi hukum, untuk mengembangkan rasa saling menghormati sebagai pribadi melalui kehidupan sosial sebagai manusia, dan untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan dan merata berdasarkan rekonsiliasi yang dapat diterima satu sama lain.

Sedangkan menurut pendapat De doore (2017:1) menyebutkan ada beberapa bagian-bagian yang menjadi tujuan dari pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan demokratis yang mencakup: belajar memahami, belajar mengeksplorasi, belajar memahami pribadi dan budaya, belajar menemukan dan memecahkan masalah. Menurutnya hal ini sangat berperan dalam memajukan identitas kewarganegaraan demokratis dan budaya sebagai bagian warga negara dan masyarakat yang baik

2. Ruang Lingkup PKn

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses untuk Satuan Dasar dan Menegah menjelaskan bahwa proses pembelajaran untuk setiap satuan pendidikan harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang serta dapat memotivasi peserta didik untuk

berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup agar siswa lebih kreatif dan mandiri.

Adapun ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meluputi aspek-aspek sebagai berikut:

1) Persatuan dan kesatuan bangsa yang meiputi hidup rukun di dalam keanekaragaman, cinta lingkungan, bangga sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan negara kesatuan republik indonesia. Berpartisipasi dalam membela negara, bersikap positif terhadap negara kesatuan republik indonesia, dan jaminan keadilan.
2) Norma, hukum dan peraturan yang meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarkat. Peraturan daerah, norma dalam kehidupan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional maupun internasional.
3) Hak azazi manusia meliputi hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, serta penghormatan dan perlindungan HAM.
4) Kebutuhan warga negara meliputi hidup bergotong royong, kebebasan berorganisasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, saling menghormati keputusan bersama dan persamaan kedudukan setiap warga negara.
5) Konstitusi negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama, konstitusi yang digunakan sebelumnya serta hubungan dasar negara dengan konstitusi.

6) Kekuasaan dan politik meliputi pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi, sistem pemerintahan.
7) Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara. Pengalaman nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta pancasila sebagai ideologi terbuka.
8) Globalisasi meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri, dan dampak globalisasi.

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk sekolah menengah atas (SMA) berdasakan K13 kelas XI semester 2 sebagai berikut:

Tabel 1. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mata pelajaran PKn SMA

Kompentensi Inti	Kompetensi Dasar
a) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. b) Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktof dan menunkukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempaktkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. c) Memahami, menerapkan, menganalisis, pengetahuan, faktual,	1.2 Menghargai nilai-nilai Ketuhanan dalam berdemokrasi pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.2 Berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 3.2 Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.2 Menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, peradabn terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan prosedural pada bidang kajian yang pesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. d) Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari disekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai keilmuan.	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber: buku guru PPKn, 2017

f. Pembelajaran PKn sebagai Upaya Penguatan Pemahaman Materi Demokrasi Siswa

Pembelajaran menurut pendapat Suprihatiningrum (2013:75) merupakan kegiatan yang dilakukan secara tersusun dengan tujuan memberikan informasi kepada siswa dalam kegiatan belajar. Kegiatan pembelajaran merupakan satu usaha yang diberikan pendidik untuk membantu siswa agar dapat menerima pengetahuan yang diberikan dan membantu memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran.

Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu pelajaran yang diberikan kepada setiap siswa. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu program pendidikan yang memberikan pemahaman kepada siswa dengan lengkap guna mendukung peran aktif siswa di dalam masyarakat, negara dan masa yang akan

datang. Untuk itu pendidiakan kewarganegaraan dianggap penting, maka perlu penerapan sejak usia dini di setiap jenjang pendidikan agar dapat menghasilkan generasi penerus bangsa.

Pendidikan kewarganegaraan menurut Feith (2011:3) diperlukan sebagai sarana yang dapat mempengaruhi individu dalam menentukan sikap dan pilihan sebagai warga negara. Menurut Feith semakin besar pengetahuan seseorang, maka akan semakin sempurna peran seorang individu tersebut sebagai warga negara. Untuk itu penting bagi pemerintah untuk memberikan pengetahuan kepada individu terutama melalui pendidikan sehingga dapat memberikan arahan dan memotivasi sehingga individu memiliki minat dan kebiasaan untuk terbiasa terlibat, ikut serta pada partisipasi terutama politik. Dengan pendidikan tersebut memberikan kefasihan yang penting bagi individu untuk berperan sebagai warga negara yang aktif. Adapun pengetahuan yang dapat memberikan dukungan bagi individu melalui pendidikan salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan pendapat Horowitz (2015:1) dan Brunold & Ohlmeier (2013:12) pendidikan kewarganegaraan memberikan kesempatan bagi semua individu untuk mendapatkan pendidikan yang diperlukan seseorang untuk mendapat motivasi dan pengetahuan agar dapat berpatisipasi aktif sebagai warga negara. Individu sebagai warga negara harus dapat memahami akan fungsi pemerintah dimana hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Tanpa peran seorang individu sebagai warga negara yang memiliki pengetahuan dan pendidikan dalam peran dan tanggung jawab, maka sebuah pemerintahan hanyalah sebuah kesalahan politik. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu cara untuk meingkatkan usaha

individu untuk dapat terlibat dalam kegiatan politik sehingga dapat meningkatkan kualitas demokrasi, hal ini dikarenakan pendidikan kewarganegaraan memiliki peran besar dan aktif dalam memberikan pengetahuan serta motivasi kepada individu sebagai warga negara.

Menurut pendapat Kaelan (2016:4) pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan antar bidang atau antardisipliner. Menurutnya pendidikan kewarganegaraan dibangun dari beberapa disiplin ilmu diantaranya yaitu: ilmu politik, ilmu hukum, ilmu filsafat, ilmu sosiologi, ilmu administrasi negara, ilmu ekonomi pembangunan, sejarah perjuangan bangsa dan ilmu budaya. Oleh karena itu pendidikan pendidikan kewarganegaraan selalu terhubung pada perkembangan pendidikan demokrasi, masyarakat lokal maupun masyarakat nasional ataupun global. Untuk itu pendidikan kewarganegaraan menjadi rumusan sebagai proses dalam mempersiapkan generasi muda agar apat mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sedangkan menurut Samsuri (2011:28) pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang menyiapkan siswa sebagai generasi muda untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan serta kecapakan dan nilai yang diperlukan siswa untuk dapat berpatisiasi aktif di dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan kepada siswa sebagi warga negara, hal ini dikarenakan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang membekali siswa dengan seperangkat pengetahuan guna mendukung peran aktif mereka dalam masyarakat dan negara di masa yang akan datang.

Menurut pendapat Bardwell (2011:1) pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan siswa tentang politik. Pendidikan kewarganegaran juga dapat memberikan motivasi dan dorongan siswa untuk terlibat langsung dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan sangat berperan besar dalam meningkatkan keterampilan dan sikap siswa untuk menggunakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi melalui pendidikan kewarganegaraan dapat membantu siswa untuk mengembangkan sikap dan keterampilan, yang diperlukan siswa sebagai warga negara muda yang memiliki peran sebagai agen perubahan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang terfokus pada pembentukan warga negara. Warga negara yang dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter.

Warga negara muda merupakan sebagian dari masyarakat yang dianggap sebagai warg negara. Mempersiakan generasi muda melalui pendidikan perlu di lakukan agar terbentuk generasi penerus bangsa yang baik. Salah satu usaha yang dapat dilakukan melalui kegiatan persekolahan. Menurut Clark (2016:25) mempersiapkan warga negara aktif perlu adanya persiapan yang matang, diantaranya ialah mempersiapkan generasi muda untuk dapat terlibat langsung pada pemilihan. Memberikan pengetahuan merupakan salah satu cara untuk mempersiapkan generasi muda yang aktif melalui lingkungan persekolahan.

Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang memiliki tujuan untuk mendidik siswa menjadi generasi penerus bangsa yang sadar akan hak dan kewajibannya dengan terlibat langsung pada proses politik.

Menurut pendapat Komalasari (2013:19) terdapat empat komptensi yang harus dimiliki warga negara muda yaitu: *learning to know* yang berarti kegiatan untuk memperoleh, memperdalam dan memanfaatkan pengetahuan. Pengusaaan materi merupakan salah satu hal terpenting bagi siswa serta memiliki kemauan belajar yang tinggi. *Learning to do*, merupakan penyesuaian diri siswa untuk beradaptasi di dalam masyarakat utnuk itu siswa perlu belajar. Siswa maupn orang dewasa lainnya memerlukan pengetahuan akademik yang hapat menghubungkan pengetuan dan keterampilan, kreatif dan adptif lalu mentransformasikan semua aspek terseut kedalam kehidupan bermasyarakat. *Leraning to be*, merupakan keterampilam akademik dan kognitif yang penting bagi siswa. Keterampilan ini berperan untuk membentuk pribadi siswa sehingga menjadi pribadi yang lebih berkualitas dan memiliki identitas. Adapun keterampilan yang dimaksud ialah: 1) keterampilan sosial dan lintas budaya; 2) tanggung jawab pribadi, pengaturan pribadi da inisiatif; 3) keterampilan berfikir logis; 4) keterampilan metakognitif, dll. *Learning to live together*, merupakan keterlibatan siswa untuk terlibat aktif di dalam diskusi, sehingga dapat membentuk siswa yang lebih kritis.

Warga negara muda di anggap sebagai warga negara masa depan, untuk itu melalui pendidikan kewarga negaraan memberikan pengetahuan warga, partisipasi politikdan pengembangan sikap dmokratis. Menurut pendapat Geijel et al (2012:724) mengatakan, berdasarkan penelitian pendidikan kewarganegaraan

disekolah memiliki hubungan antara tingkat kognitif siswa dengan pengetauan kewarganegaraan. Menurutnya semakin tinggi aspek kognitif siswa maka akan semkin tinggi pula pengetahuan kewarganegaraannya.

Peran sekolah memberikan kesempatan terbaik bagi siswa untuk membangun pemahaman demokratis, melalui berbagai kegiatan pembelajaran, melalui pengetahuan maupun nilai-nilai yang ada disekolah sehingga terbentuk keterampilan siswa sebagai warga negara muda. Untuk itu warga negara muda merupakan warga negara yang memerlukan arahan ataupun bimbingan terutama dalam pendidikan guna mempersiapkan sebagai warga negara dewasa yang baik. Warga negara dewasa sendiri merupakan warga negara yang sudah mengetahui hak dan kewajiban di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu perlu persiapan bagi warga negara muda melalui pendidikan persekolahan untuk dapat terbentuk sebagai warga negara yang baik dan cerdas.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran dengan satu rangkaian proses untuk mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter bangsa Indonesia, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat

2. Lingkungan Keluarga

a. Hakikat Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang hidup bersama dalam masyarakat dan terhubung oleh ikatan perkawinan. Keluarga juga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi seorang anak karena keluarga adalah agen

utama sosialisasi. Harmoko (2012:23) mengartikan keluarga sebagai sekumpulan orang yang terhubung oleh ikatan perkawinan, unit terkecil dalam masyarakat yang menempati posisi antara individu dan masyarakat yang saling terikat melalui pertalian darah. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, keluarga didefinisikan sebagai bagian terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan suami istri dan anak. Dari pengertian ini, dapat dikatakan bahwa keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang terbentuk dari beberapa orang yang terikat perkawinan, kelahiran yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan sosial satu dengan lainnya sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan tingkah laku dan perkembangan anak.

Menurut pendapat Valeeva & Biktagirova (2016:69) keluarga merupakan sumber budaya, nilai-nilai dan karakter yang dapat membentuk kepribadian seorang anak. Pemahaman yang diberikan keluarga akan menjadi dasar anak untuk bersikap dalam hubungan sosial kepada anggota individu di luar keluarga inti. Oleh sebab itu keluarga dikatakan sebagai institusi sosial pertama dan utama bagi seorang anak. Untuk itu perlu adanya hubungan keluarga yang kuat sistem nilai-nilai di dalam keluarga harus ditanamkan dan menjadikan kebiasaan pada lingkungan keluarga. Menurut Bartoszuk, et. al (2019:9) kebiasaan keluarga memiliki tempat dimana kondisi lingkungan terhubung langsung oleh nilai-nilai sosial dan norma yang bersifat universal bagi seluruh anggota keluarga. Keluarga sebagai pondasi yang membentuk nilai dan karakter individu anak, secara maksimal berperan besar memiliki pengaruh utama karena dapat memberikan contoh secara langsung namun hal ini tentu saja tidak didapat di sekolah.

Menurut Huff & Cotte (2016:894) berpendapat bahhwa keluarga merupakan kumpulan dari individu yang saling berhubung dan berbagi dalam rasa kepemilikan bersama sepanjang waktu. Dai & Wang (2015:134) menyatakan, *"family is not only the basic unit of society, but also an important place for individual physical and mental growth".* Bahwa keluarga merupakan tempat terpenting bagi pertumbuhan fisik dan mental seorang individu, hal ini dikarenakan keluarga sebagai tempat dalam mencukupi kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan psikologi rasa aman dan sayang dari setiap anggota keluarga.

Hasbullah (2012:38) mengatakan bahwa lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak untuk mendapat didikan dan bimbingan. Lingkungan keluarga dianggap sebagai lembaga pendidik informal yang merupakan tanggung jawab dan mengharuskan orang tua yaitu ayah, ibu sebagai pusat pendidikan untuk mengkondisikan setiap kehidupan dalam keluarga menjadi situasi pendidikan. Selain itu menurut pendapat Nieto (2010:143) pandangan pada individu tertanam sejak dini oleh lingkungan keluarga. Melalui interaksi antar anggota keluarga secara tidak langsung telah memberikan pemahaman dan pembelajaran pada anak akan paraturan yang ada di lingkungan keluarga. Oleh karena itu pendekatan melalui lingkungan keluarga sangat diperlukan, pendekatan melalui percakapan sehari-hari antar anggota keluarga dapat memberikan pengetahuan pada anak.

Menurut Morling (2014:9) melalui budaya anak dapat belajar dan membentuk diri sesuai dengan lingkungan disekitar. Mencontoh kebiasaan melalui komunikasi, sosial hingga teman sebaya sehingga dapat meningkatkan berpikir kritis anak.

Menurut pendapat Rahiem et.al (2012:114) Keluarga merupakan tempat yang terpenting bagi anak-anak. Hal ini karena waktu terbanyak yang anak-anak habiskan dilingkungan keluarga sehingga tercipta ikatan emosional yang tinggi. Keluarga memberikan rasa nyaman dengan rasa perawatan jangka panjang, namun hal tersebut akan rusak ketika interaksi antara anak dan orang tua memiliki kehidupan lingkungan keluarga yang tidak stabil. Orang tua dalam keluarga memberikan interaksi yang intensif sehingga penanaman nilai-nilai yang keluarga berikan akan tertanam kuat. Selain keluarga, sekolah juga menjadi lingkungan anak untuk belajar berinteraksi dan bersosil. Oleh sebab itu sekolah dan guru harus memberikan dukungan pertama dengan usaha menciptakan lingkungan yang menerima dan membina. Orang tua, guru, dan keluarga bekerjasama untuk menumbuhkan sikap sosial yang baik sehingga tercipta pula sikap peduli dan mendukung satu sama lainnya.

Bedasarkan pendapat diatas dapat disimpukan bahwa lingkugan keluarga kumpulan beberapa individu yang yang saling terkait dan mejadi lingkungan pendidikan pertama bagi anak untuk membentuk tingkah laku, karakter, pertumbuhan dan perkembangan anak. Keberhasilan pendidikan anak ditentukan sejak awal dari lingkungan keluarga hal ini karena sebagian besar kehidupan anak berada di dalam lingkungan keluarga dengan waktu yang lama.

Santrock (2014:260) berpendapat bahwa sosialisasi orang tua kepada anak dianggap sebagai proses satu arah. Anak-anak dipandang sebagai hasil dari sosialisasi dari orang tua yang mereka berikan. Orang tua berperan penting untuk membentuk kepribadian anak. Memberikan nilai-nilai dan norma kepada anak

sebelum memasuki lingkungan masyarakat. Oleh karena itu anak dikatakan sebagai cerminan dari orang tua sebab anak mencontoh dan mengikuti berbagai kebiasaan dan perilaku dari orang tua.

Menurut pendapat Jin & Liu (2017:171-173) bahwa pendidikan yang diberikan keluarga merupakan pondasi dan sebagai pelengkap bagi pendidikan anak disekolah. Sebagai sarana sosialisasi keluarga memberikan pengaruh besar terhadap lingkungan kognitif anak terutama pada kempuan dan bakat anak tersebut. Salah satu sarana terpenting adalah sosial keluarga yang mempengaruhi pendidikan anak, dimana keterlibatan orang tua berperan besar seperti memberikan pengajaran, berdiskusi topik pendidikan dan lain-lain. Oleh sebab itu pendidikan yang anak terima dalam keluarga akan langsung berpengaruh pada akademik terutama pada perilaku anak tersebut.

b. Fungsi dan Peran Keluarga

Menurut pendapat Lewton & Nievar (2012:689) keluarga sebagai alat pendidikan dalam kehidupan anak dengan memperkuat hubungan antar anggota keluarga. Keluarga berfungsi bagi pertumbuhan individu dikarenakan melalui ikatan keluarga dapat memperdalam hubungan sehingga dapat mempererat keterampilan interpersonal yang lebih efektif. Pendidikan kehidupan dalam keluarga melalui diskusi guna memperkuat tujuan pendidikan dalam keluarga itu sendiri, karena melalui diskusi dapat berupa sebagai konselor ataupun terapis bagi individu dan keluarga itu sendiri. Selain itu melalui keluarga juga dapat memberikan pengalaman begitu juga sebaliknya, menjadikan anak dengan kemauan dirinya sendiri terbiasa untuk terhubung dengan orang lain sehingga dapat

membentuk ikatan yang baik dengan perkembangan psikososial individu seiring dengan tmbuh kembang individu tersebut. Keluarga memberikan pengarahan perkembangan pertumbuhan psikososial karena dapat memberikan pengalaman dan nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak dengan jangka panjang. Pengalaman belajar yang terstruktur dan aktif dapat memperkuat hubungan keluarga, memiliki potensi besar dalam meningkatkan keterampilan konunikais dan pengetahuan individu berbagai pengalaman di dalam maupun di luar anggota keluarga. Namun keluarga juga memiliki kekurangan seperti salah satunya adalah waktu. Kurangnya waktu menjadi penghalang bagi anggota keluarga untuk dapat mengembangkan hubungan yang kuat berbagi tahapan perkembangan positif dalam keluarga itu sendiri

Menurut Friedman (2014:86) ada delapan fungsi keluarga, yakni sebagai berikut: 1) Fungsi agama, sebagai guru dalam pendidikan anak orang tua juga berperan sebagai ahli agama dalam membentuk kepercayaan anak. 2) Fungsi sosial budaya, keluarga berperan penting dalam membentuk dan menerapkan pola tingkah laku yang bersangkutan dengan orang lain, selain itu keluarga juga menjadi masyarakat pertama yang dapat memberikan dan memperkenalkan anak kedalam masyarakat. 3) Fungsi cinta dan kasih sayang, peran keluarga dalam membentuk kepriadian anak angat berpengaruh, oleh sebab itu cinta dan kasih sayang sangat diperlukan. 4) Fungsi perlindungan, rasa aman dan kasih sayang dari orang tua merupakan faktor penting dalam proses perkembangan anak untuk menjadikan keluarga tempat mengadu dan mengakui kesalahan. 5) Fungsi sosialisasi dan pendidikan, pentingnya peran keluarga dalam membentuk kepribadian anak

dimulai dari awal pertumbuhan hingga dewasa sebelum memasuki kehidupan masyarakat. 6) Fungsi ekonomi, peran keluarga dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga.

Fungsi lingkungan, berfungsi untuk membentuk tingkah laku seseorang yang dimana semua berawal dari lingkungan dalam keluarga, dikarenakan anak menerapkan kesesuaiaan terhadap lingkungan. Menurut pendapat Hasbullah (2012:39-43) fungsi dan peranan pendidikan keluarga yaitu:

1) Pengalaman pertama masa kanak-kanak

   Merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak dikarenakan keluarga memberikan pengalaman pertama. Pendidikan keluarga sangat penting menjadi untuk menjadi perhatian sebab pendidikan awal yang membentuk keseimbangan jiwa dalam individu selanjutnya akan ditentukan.

2) Menjamin kehidupan emosional anak

   Rasa kasih sayang dan kehidupan emosional yang berkembang dengan baik di dapat anak melalui pendidikan keluarga karena adanya hubungan darah antara orang tua dan anak menjadikan pendidikan di dasari atas rasa cinta dan kasih sayang.

3) Menanamkan dasar moral

   Peran keluarga dalam menanamkan nilai dan dasar-dasar moral terhadap anak menjadi hal paling utama. Hal ini dapat tercermin dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai *role model* bagi anak.

4) Memberikan dasar pendidikan

Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak merupakan lembaga sosial karena itu pentingnya menanamkan dasar-dasar pendidikan sosial di dalam keluarga.

5) Peletakan dasar-dasar keagamaan

Sebagai lembaga pendidikan pertama anak, hal ini tentuunya menjadi penentu dalam menanamkan dasar-dasar nilai dan norma yang sangat penting sebagai proses internalisasi nilai-nilai keagamaam ke dalam pribadi anak.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi dan peran keluarga dalam pendidikan anak terdiri dari masa kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional, pendidikan moral, pendidikan sosial serta penanaman dasar-dasar keagamaan. Oleh karena itu lingkungan keluarga menjadi tempat bagi anak belajar dalam membentuk diri dalam fungsi sosialnya.

c. Indikator Lingkungan Keluarga

Menurut pendapat Slameto (2010:60) indikator lingkungan keluarga yaitu:

1) Cara orang tua mendidik

Berhasil atau tidaknya anak dalam belajar, peran orang tua sangat berpengaruh. Orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan anaknya dapat menyebabkan kurang berhasil dalam belajar.

2) Relasi antar anggota keluarga

Hubungan terpending didalam keluarga adalah hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan yang disertai kasih sayang dan penuh pengertian dalam bimbingan atau menghukum anak jika melakukan pelanggaran atau kesalahan yang melampaui batas dengan tujuan agar anak lebih baih baik dalam bersikap dan untuk mensukseskan belajar anak itu sendiri.

3) Suasana rumah

Suasana rumah yang diharapkan sebagai situasi dimana anak berada dan dapat belajar. Suasana rumah yang kondusif akan membantu anak untuk menciptakan rasa nyaman dan semangat dalam belajar namun jika sebaliknya jika suasana rumah dengan kondisi penuh perengkaran antar anggota keluarga dan suasana tegang maka hal tersebut akan membuat anak menjadi merasa tidak nyaman di dalam lingkungan keluarganya sendiri.

4) Keadaan ekonomi keluarga

Kondisi ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, kesehatan, fasilitas dan lain-lain perlu dipenuhi untuk meningkatkan rasa nyaman anak.

5) Pengertian orang tua

Perlunya dorongan dan pengertian orang tua terhadap anak sangat diperlukan. Memberi semangat dan pemahaman untuk membantu anak dalam mengatasi kesulitan di sekolah.

6) Latar belakang kebudayaan

Kebiasaan atau tingkat pendidikan di dalam lingkungan keluarga berpengaruh besar terhadap sikap anak dalam belajar. Pentingnya menanamkan nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam keluarga untuk dapat mendorong anak memiliki kebiasaan dan pengetahuan yang baik serta memberi semangat anak dalam belajar.

d. Kaitan Lingkungan Keluarga dengan Partisipasi Politik

Lingkungan pertama bagi seorang anak adalah keluarga. Belajar akan nilai dan norma yang akan dikembangkan dilingkungan sosial yang berada diluar lingkungan keluarga. Peran orang tua dalam menentukan partisipasi politik. Menurut pendapat Wohlstette et al, (2011:72) keterlibatan orang tua baik di rumah maupun disekolah. Mendukung dengan cara berdiskusi mengenai kegiatan sekolah, membantu anak dalam memecahkan kegiatan dirumah, memberikan pandangan politik dan lain-lain. Sikap posisi yang orang tua tunjukkan kepada anak tentunya akan berpengaruh kepada pemahaman akan nilai-nilai dan pengajaran yang orang tua berikan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa orang tua memiliki andil dalam memberikan pendidikan kepada anak. Terutama dalam menanamkan nilai dan pemahaman tentang partisipasi politik. Menciptakan hubungan positif dan berdiskusi dengan anak untuk membicarakan mengenai pengetahuan akan politik sehingga dengan begitu anak mengerti dan memiliki motivasi untuk berpastisipasi dalam partisipasi politik.

Keluarga merupakan salah satu elemen penting yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi anak. Karena di dalam keluarga nilai-nilai karakter dan sikap kritis serta aktif didapatkan pertama kali oleh anak. Maka dari itu di butuhkan kerja sama antara lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkunga masyarakat dalam membentuk budaya partisipasi aktif anak. Hal ini sejalan dengan pendapat Sumera et, al (2018:121-136) bahwa lingkungan keluarga dan teman sebaya berperan penting sebagai agen sosialisasi politik dalam partisipasi dikalangan

pemuda. Prilaku politik dikalangan pemuda dibentuk melalui komunikasi langsung antar pribadi. Hal ini terjadi di dalam lingkungan keluarga yang komunikatif, dapat menciptakan diskusi yang mendorong ketertarikan dan keterlibatan pemuda dalam politik.

Dalam kehidupan sehari-hari di setiap keluarga yang satu memiliki perbedaan dengan keluarga yang lainnya, ada beberapa tipe keluarga Murwani (2007:19) diantaranya:

a. Tipe Keluarga Tradisional
    a) Keluarga Inti yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak- anak.
    b) Keluarga Besar yaitu keluarga inti ditambah dengan sanak saudara seperti saudara sepupu, paman, bibi, nenek dan lain- lain.
    c) Keluarga *Dyad* merupakan rumah tangga tanpa anak dan hanya terdiri suami dan istri.
    d) *Single Parent* merupakan rumah tangga yang hanya terdiri dari satu orang tua yang dikarenakan kematian atau perceraian dan anak.
    e) *Single Adult* dalah rumah tangga satu orang dewasa yang tinggal seorang diri untuk bekerja ataupun kuliah.
b. Tipe Keluarga Non Tradisional
    a) *The Unmarried Teenage Mothers*, bentuk keluarga yang hanya terdiri dari satu orang tua dan anak dari hubungan tanpa menikah.
    b) *The Stepparent Family* yaitu sebuah bentuk keluarga dengan orang tua tiri.

c) *Commune Family* merupakan keluarga yang hidup dalam satu rumah yang terdiri dari beberapa keluarga tanpa ada ikatan darah ataupun ikatan keluarga.

d) *The Nonmarital Heterosexual Cohabiting Family* yaitu keluarga yang berganti-ganti pasangan tanpa hubungan pernikahan, tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah.

e) *Gay and Lesbian Family* adalah hubungan pasangan seseorang yang hidup bersama sebagai suami istri dengan persamaan *sex* atau hubungan sejenis

f) *Cohabiting Couples* yaitu hubungan tanpa ikatan pernikahan dan hidup bersama dalam satu rumah dengan alasan tertentu.

g) *Group Marriage Family* merupakan hubungan beberapa orang dewasa yang berbagi kehidupan mulai dari alat-alat rumah tangga, seksualitas hingga membesarkan anaknya dan merasa sudah menikah.

h) *Group Network Family* merupakan bentuk keluarga inti yang dibatasi aturan atau keluarga yang hidup berdampingan satu sama lainnya yang saling menggunakan barang dan pelayanan rumah tangga dan tanggung jawab membesarkan anaknya.

i) *Foster Family* adalah keluarga menjaga anak yang tidak ada hubungan darah ataupun keluarga untuk sementara waktu.

j) *Homeless Family* yaitu keluarga yang krisis personal dan tidak memiliki perlindungan yang permanen dikarenakan keadaan ekonomi maupun kesehatan mental.

k) *Gang* merupakan keluarga yang terbentuk berdasarkan ikatan emosional yang terdiri dari orang-orang muda dan berkembang dalam kriminal dan kekerasan dalam kehidupannya.

Keluarga memiliki bentuk-bentuk struktur yang merupakan pola hubungan dalam keluarga yang bersifat komplek dan berinteraksi satu dengan yang lain secara terus menerus. Struktur keluarga menurut Friedman (2012:19) diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Struktur Komunikasi

Komunikasi di dalam keluarga berfungsi dengan baik apa bila secara jujur, terbuka, melibatkan emosi, menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Komunikasi keluarga yang baik juga memberi ruang bagi individu yang terlibat di dalamnya dapat mengemukakan pesan secara jelas dan berkualitas, serta meminta dan menerima umpan balik. Individu juga dapat mendengarkan pesan, memberikan umpan balik. Sedangkan komunikasi dalam keluarga dikatakan tidak berfungsi apabila tertutup, adanya isu atau berita negatif, tidak berfokus pada satu hal, dan selalu mengulang isu dan pendapat sendiri. Komunikasi keluarga bagi individu bersifat asumsi, ekspresi perasaan tidak jelas, judgemental ekspresi, dan komunikasi tidak sesuai. Terjadi miskomunikasi, dan lain sebagainya.

2. Struktur Peran

Struktur peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai posisi sosial yang diberikan. Jadi pada struktur peran bisa bersifat formal atau informal. Posisi atau status adalah posisi individu dalam masyarakat misal status sebagai istri atau suami.

3. Struktur Kekuasaan

Struktur kekuatan adalah kemampuan dari individu untuk mengontrol, memengaruhi, atau mengubah perilaku orang lain. Hak (legimate power), ditiru (referent power), keahlian (exper power), hadiah (reward power), paksa (coercive power), dan efektif power.

4. Struktur nilai dan norma

Nilai adalah sistem ide-ide, sikap keyakinan yang mengikat anggota keluarga dalam budaya tertentu. Sedangkan norma adalah pola perilaku yang diterima pada lingkungan sosial tertentu, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat sekitar keluarga. Oleh karena itu nilai merupakan suatu sistem, sikap, kepercayaan yang secara sadar atau tidak dapat mempersatukan anggota keluarga. Sedangkan norma merupakan pola perilaku yang baik menurut masyarakat berdasarkan sistem nilai dalam keluarga, dan budaya merupakan kumpulan dari pada perilaku yang dapat dipelajari, dibagi dan ditularkan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah.

3. Partisipasi Politik

a. Pengertian Partisipasi Poitik

Partisipasi politik merupakan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan politik. Seluruh individu memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam menentukan pilihan sebagai warga negara. Menurut pendapat Rush & Althoff (2011:147) bahwa partisipasi politik merupakan sebuah usaha warga negara dalam memilih pemimpin yang mewakili mereka dan mempengaruhi kebijakan bentuk kebijakan umum. Partisipasi politik merupakan sarana bagi warga negara untuk terlibat langsung dalam menentukan kebijakan pemerintahan. Melalui

partisipasi politik setiap masyarakat dapat memilih pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan untuk membuat keputusan kebijakan yang akan berpengaruh bagi hidup semua elemen masarakat kedepannya.

Menurut Sitepu (2016:92) partisipasi politik adalah bentuk kegiatan masyarakat di dalam politik dengan tujuan untuk dapat mempengaruhi proses dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendapat Qadir (2016:36-37) bahwa partisipasi politik merupakan seluruh kegiatan warga negara yang bertindak untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintahan. Didukung dengan pendapat Pacheco & Owen (2014:1) secara umum partisipasi politik dapat diartikan sebagai tindakan yang bertujuan memengaruhi pemerintah, baik dengan memengaruhi pemilihan pejabat pemerintah atau dengan memengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pegawai pemerintah.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan setiap individu atau warga negara dengan tujuan untuk dapat mempengaruhi keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan dengan rasa sukarela tanpa adanya paksaan baik dari negara maupun penguasa. Seluruh warga negara tanpa terkecuali pemilih pemula memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi di dalam kegiatan politik. Pemilih pemula merupakan pemilih dengan usia minimal 17 tahun.

Nilai-nilai penting dalam partisipasi politik yang harus diajarkan pada setiap indvidu untuk menjadi warga negara yang baik terutama pada pemilih pemula. Menurut Kitanova (2019:14) partisipasi politik warga negara muda merupakan hal

penting bagi negara yan menganut sistem demokrasi. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi partisipasi politik kaum muda diantaranya ialah faktor sosial dan demografis. Dimana hal tersebut sangat mempengaruhi partisipasi politik pemuda. Namun selain itu, demokrasi juga dapat mempengaruhi bentuk partisipasi politik terutama dikalangan pemuda. Partisipasi politik remaja sangat ditentukan oleh kematangan demokrasi di dalam negara suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda diantaranya ialah usia, pendidikan dan kelas sosial. Adapun tingkat usia pemuda yang dapat digolongkan yaitu, 1) 18-24 tahun akan lebih cenderung terlibat di dalam organisasi. 2) 25-30 akan lebih cenderung berpartisipasi di dalam kegiatan politik formal. Jadi dapat disimpilkan bahwa semakin tinggi usia seseorang maka akan semakin besar pula keterlibatan seseorang di dalam politik yang lebih formal. Oleh sebab itu di dalam sebuah sistem demokrasi, sangat penting keterlibatan seluruh warga negara tidak terkecuali pemuda untuk dapat terlibat langsung dalam partisipasi politik. Pemilihan umum melalui pemungutan suara di dalam sebuah demokrasi merupakan hal yang menjadi kebiasaan, untuk itu sangat penting bagi seluruh masyarakat untuk dapat terlibat langsung dalam partisipasi politik untuk menetukan pilihan diantaranya melalui pemilu.

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Karena keputusan politik yang dibuat dan

dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Menurut Gherghina & Geissel (2017:81) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar kedalam situasi tertentu, hal ini juga sejalan dengan pendapat Rush & Philip (2003: 23) bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu hingga berbagai macam tingkatan di dalam sistem politik. Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam menyampaikan saran atau pendapat untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar terjadi suatu perubahan kearah yang lebih baik.

b. Bentuk Partisipasi Politik

Demokrasi pada suatu negara diwujudkan dengan adanya pemilu untuk memilih pemimpin bangsa berdasarkan pilihan rakyat. Pemilihan umum merupakan sarana utama warga negara untuk menentukan sendiri nasibnya untuk memilih wakilnya di lembaga negara melalui ikut serta dalam berpartisipasi politik. adapun bentuk-bentuk partisipasi politik menurut pendapat Rush & Althoff (2007:122) mengidentifikasikan bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

a. Menduduki jabatan politik atau administratif
b. Mencari jabatan politik atau administratif
c. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
d. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
e. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (quasi politikal)

f. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya

g. Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik

h. *Voting* (pemberian suara)

i. Apaty total

Menurut pendapat Qadir (2016:45-46) bentuk-bentuk partisipasi politik:

1) Kegiatan pemilihan
2) Lobbying
3) Kegiatan organisasi
4) Mencari koneksi (*contacting*)
5) Tindak kekerasan (*violence*)

Berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dibedakan melalui kegiatan politik yang berbentuk konvensional maupun nonkonvesional. Bentuk saluran partisipasi politik dapat diukur sebagai ukuran kestabilan sistem politik, karakter politik dan kepuasan ataupun ketidak puasan warga negara. Adapun bentuk partispasi pemuda yakni berupa, demonstrasi, pemogokan dan kegiatan protes. Hal ini sejalan dengan pendapat dengan Albacete (2014:219) bentuk partisipasi politik pemuda berbeda dengan orang dewasa. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah pemuda yang mengikuti partisipasi politik, mereka memilih untuk mengikuti partisipasi informal seperti mengikuti kegiatan demonstrasi, menandatangani petisi.

Bentuk-bentuk partisipasi politikyang dikemukakan oleh Huntington & Nelson (1994:16-19) terbagi di dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisiasi politik non kenvensional.

1. Partisipasi politik konvensional

a. Pemberian suara atau voting
b. Diskusi politik
c. Kegiatan kampanye
d. oMembentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
e. Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administrasi.

2. Partisipasi politik non konvensional
   a. Pengajuan petisi
   b. Berdemonstrasi
   c. Konfrontasi
   d. Mogok
   e. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda: pengrusakan, pemboman dan pembakaran.
   f. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa bentuk partisipasi politik diantaranya adalah konvensional dan non konvensonal serta partisipasi aktif maupun partisipasi pasif. Semua warga negara bebas untuk mengekspresikan partisipasi politik mereka dengan berbgai bentuk. Berbagai hambatan untuk mengekspresikan dan menunjukkan partisipasi pada saat ini dialamai khususnya oleh pemilih pemula. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan, kurangya perhatian baik dari dari pemerintah, keluarga mauun persekolahan yang mana hal tersebut dapat menghambat mereka untuk ikut dan berpartisipasi dalam politik.

c. Faktor Mempengaruhi Partisipasi Politik

Menurut pendapat Cangara (2011:125) beberapa faktor penyebab partisipasi politik yaitu, 1) adanya semangat demokrasi yang semakin kuat sehingga mampu menjunjung tinggi hak rakyat dalam partisipasi politik. 2) peningkatan pengetahuan masyarakat dan semakin kritis sehingga dapat mendorong tindakan untuk berpartisipasi dalam politik. 3) perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin luas, sehingga masyarakat dengan mudah mendapat informasi 4) peningkatan dan kemajuan dibidang ekonomi, dengan demikian masyarakat beranggapan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kehidupan warga negara. 5) perkembangan kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral. 6) berperannya kelompok-kelompok lembaga swadaya masyarakat dan organisasi aktivis mahasiswa yang melakukan gerakan moral dan lain-lain.

Menurut Surbakti (2010:144) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi yang otonom adalah :

1. Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara hal ini menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan dan politik tempat ia hidup. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat tempat dia hidup.
2. Kepercayaan terhadap pemerintah yaitu penilaian seseorang terhadappemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat atau tidak. Apabila pemerintah sebelumnya dianggap tidak dapat mengakomodir aspirasi

masyarakat, maka pada pemilihan politik selanjutnya akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat.

Menurut pendapat Peter (2013: 157) keterlibatan politik seseorang lebih cenderung bersifat pribadi dan sering terjadi diruang privat, seperti halnya dalam kegiatan sehari-hari dilingkungan sosial setiap individu. Namun dengan kegiatan sehari- hari dalam bersosial dengan lingkungan sekitar, seperti lingkungan keluarga juga dapat mendorong tingkat partisipasi seseorang dalam politik.

Selain itu menurut pendapat Gil de Zuniga et, al (2012:331) partisipasi politik dapat didorong dengan melakukan berbagai kegiatan yang membentuk budaya atau kebiasan sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik yang bertujuan agar mampu menciptakan demokrasi yang baik dengan keterlibatan politik dari masyarakat secara aktif.

Selain itu menurut pendapat Quintelier & Blais (2015:176) partisipasi politik juga dapat dipengaruhi melalui lingkungan pendidikan, seperti ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan yang dapat memberikan pengetahuan nilai politik. Melalui pendidikan kewarganegaraan secara langsung dapat mentransfer dan memperluas pengetahuan dan pemahaman warga muda akan politik. Oleh karena itu sekolah merupakan tempat terpenting bagi siswa untuk dapat belajar dan terlibat langsung dalam pemilihan. Hal ini didukung oleh pendapat Witschge & van de Werfhorst (2015:12) bahwa ada dua faktor yang dapat mempengaruhi keterlibatan siswa dalam partisipasi yaitu sekolah dan hubungan latar belakang sosial. Baik sekolah maupun latar belakang sosial siswa merupakan hal penting dalam mengembangkan kemampuan kognitif siswa. Sekolah menjadi pedoman yang

utama bagi partisipasi siswa terutama keterlibatan dalam masyarakat. Namun kurangnya minat dalam isu-isu politik di dalam keluarga juga dapat menjadi latar belakang ketimpangan sosial yang berpengaruh bagi partisipasi siswa. Namun diantara keduanya hal yang sangat berpengaruh besar pasa partisipasi siswa ialah sekolah, dimana di dalam sekolah terdapat pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dapat memberikan sosialisasi selain orang tua siswa yang berada di dalam lingkungn siswa tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik seseorang dapat disebabkan melalui lingkungan sekitar, seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, kebiasaan yang terdapat diruang lingkup masyarakat maupun lingkungan persekolahan. Dengan meningkatkan partisipasi politik tentunya dapat menciptakan demokrasi yang baik dengan melibatkan seluruh warga negara terutama pada pemilih pemula.

Partisipasi politik tidak dapat dipisahkan dengan komunikasi politik, setiap kegiatan politik, tujuan, fungsi dan manfaat partisipasi politik pasti ada komunikasi atau cara untuk menyampaikan tujuan-tujuan politik, karena itu perlunya komunikasi politik dilakukan, terutama komunikasi politik terhadap pemilih pemula. Komunikasi politik bertujuan untuk mengarahkan para pemilih pemula untuk turut berpartisipasi politik, komunikasi politik tertama untuk para pemilih pemula disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahamnnya. Komunikasi politik untuk menghimpun partisipasi politik generasi muda melalui budaya populer dan memanfaatkan kemajuan teknologi (Beers 2018: 1).

Selain itu menurut Fuchs (2007: 3) partisipasi politik masyarakat yang dilakukan sehari hari dapat membentuk budaya politik, berikut beberapa pengaruh budaya politik yang dapat mempengaruhi partisipasi politik, yaitu, 1.) budaya politik yang terdapat pada sikap dan perilaku masyarakat, 2.) nilai- nilai politik yang diinternalisasikan melalui sosialisasi. Jadi sikap politik dan partisipasi politik dipengaruhi oleh sosialisasi politik oleh agen sosial. 3. rezim demokrasi pada suatu negara mempengaruhi partisipasi politik warganya.

Andersson (2017:1) juga berpendapat bahwa partisipasi politik, seringkali dimaknai dan dikaitkan dengan partisipasi dalam pelaksanaan demokratis, baik untuk memengaruhi proses maupun memengaruhi membentuk struktur kemasyarakatan meliputi lembaga pemerintah di tingkat nasional dan di tingkat daerah, sekolah, organisasi kemasyarakatan pemuda, koalisi masyarakat dan lain sebagainya. Partisipasi politik dari generasi muda merupakan aspek penting dari terlaksananya sosialisasi politik, yang juga sangat dipengaruhi berbagai jenis komunikasi, minat, perasaan, kebiasaan dan keterampilan, penyesuaian dan pemahaman dengan norma, nilai, pengetahuan dan perilaku politik negara, kelompok atau bagian kelompok.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik seseorang, terutama pada generasi muda yang tergolong pemilih pemula diperlukannya pemahaman dan pengetahuan untuk dapat memotivasi partisipasi politik mereka. Pemahaman dan pengetahuan dapat diberikan melalui sosialisasi yang diberikan melaui berbagai macam lembaga. Adapun beberapa diantaranya ialah sekolah maupun keluarga. Sekolah memberikan pengetahuan kepada siswa

yang tergolong dalam generasi muda yang akan menjadi pemilih pemula, salah satunya melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk mensosialisasikan pemahaman tentang politik. Sekolah memberikan pengetahuan dan peranan siswa serta pandangan yang konkrit terhadap politik. Selain itu sekolah juga merupakan mewariskan kepada siswa tentang sikap dan nilai-nilai kepada siswa melalui pelajaran dan aturan yang ada di sekolah. Untuk itu sekolah melalui pelajaran pendidikan kewarganegaran memiliki peranan penting bagi siswa untuk dapat terlibat langsung dalam masyarakat dan berpartisipasi dalam politik. Keluarga merupakan struktur sosialisasi pertama bagi seorang anak. Keluarga memberikan pengaruh dalam pembentukan sikap. Pembiasaan di dalam keluarga memberikan kecakapan anak untuk melakukan interaksi pada masyarakat sehingga membentuk sikap anak dengan menenpatkan anak di dalam dunia kemasyarakatan.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Untuk menjadi bahan referensi di dalam penelitian ini juga diteiti beberapa penelitian yang relevan dengan judul "Pengaruh pemahaman materi demokrasi dan lingkungan keluarga terhadap tingkat partisipasi politik politik siswa sebagai pemilih pemula di SMA Negeri Se-Kabupaten Bantul".

1. Penelitian Asmika Rahman (2018) yang berjudul "Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan". Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting untuk memberikan pemahaman tentang politik kepada pemilih pemula, melalui pendidikan di dalam lingkungan sekolah terutama bagi pemilih pemula. Mensosialisasikan pendidikan politik melalui sarana dan prasana yang

ada di sekolah terutama pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan penting dilakukan untuk memberikan motivasi terhadap pemilih pemula agar dapat turut serta aktif dalam kehidupan politik. Terdapat persamaan antara penelitian Asmika (2018) dengan penelitian yng dilakukan peneliti adalah materi pembelajaran terutama pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman dan pendidikan politik yang diperlukan oleh pemilih pemula melalui pendekatan rasional agar dapat membuat keputusan dan turut serta dalam memilih. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini lebih menekankan kepada pemahaman materi dmeokrasi yang terdapat didalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Persamaan

2. Penelitian Khairunnisa (2016) yang berjudul "Partisipasi dan Perilaku Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Presiden 2014" meyimpulkan bahwa pada pelaksanaan pemilihan umum presiden tahun 2014 kecenderungan perilaku politik pemilih pemula untuk memilih dikarenakan pilihan rasional. Pilihan rasional merupakan pengetahuan dan informasi yang didapat oleh pemilih pemula yang menjadi faktor utama terhadap bentuk perilaku politik pemilih pemula. Hal tersebut juga didukung oleh orang tua yang memberikan kebebasan kepada pemilih pemula dalam memenukan pilihan. Persamaan antara penelitian Khairunnisa (2016) dengan peneliti ialah perilaku politik pemilih pemula itu dipegaruhi oleh pengetahuan pemilih pemula itu sendiri. Adapun perbedaan dalam penelitian ini, bahwa kedekatan emosional tidak dapat menentukan pilihan politik pemilih pemula.

3. Penelitian Rohmat, dkk (2018) yang berjudul Pengaruh Pendidikan Politik dan Demokrasi Bagi Generasi Muda Terhadap Tingkat Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum. Dalam penelitiannya Pendidikan politik merupakan upaya edukatif yang sistematis dan disengaja untuk membentuk individu yang sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang dapat bertanggung jawab secara moral dalam mewujudkan tujuan politik itu sendiri. Untuk itu generasi muda memiliki posisi dan peran yang utama dalam mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang berdemokrasi. Pemuda sebagai agen perubahan dalam segala aspek untuk itu penting bagi pemuda sebagai generasi muda untuk dapat berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial. Para pemuda juga memiliki kewajiban moral dalam mewujudkan generasi melek politik dan memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam pembangunan demokrasi negara. Upaya edukasi pendidikan politik dan demokrasi sejak dini terhadap para pemuda ini tidak lain adalah untuk memberikan pedoman generasi muda Indonesia yang berguna untuk meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara dalam pelaksanaan pemilihan umum. Kajian dalam penelitian ini tentunya memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian di atas. Pada penelitian ini upaya dalam memberikan pengetahuan politik tidak hanya terdapat pada pendidikan demokrasi juga terhadap pendidikan politik yang memiliki peranan penting dalam memberikan pengetahuan sehingga dapat melahirkan para pemilih pemula dalam pesta demokrasi.

C. Kerangka Pikir

1. Pengaruh Pemahaman Materi Demokrasi terhadap Tingkat Partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula di SMA Negeri Kabupaten Bantul

Pemahaman materi demokrasi merupakan salah satu materi pelajaran PPKn yang memberikan pemahaman dan pembiasaan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 UU No 20 Tahun 2003 tentang fungsi pendidikan nasional yang tercantum pada salah satu diantaranya adalah untuk membangun individu yang demokratis. Pentingnya menanamkan nilai dan prinsip demokrasi sedini mungkin terhadap peserta didik guna membentuk individu-individu cerdas yang memiliki nilai kebebasan, persamaan, persaudaraan, kejujuran serta keadilan di dalam diri mereka. Melalui materi demokrasi yang diberikan dalam pembelajaran saat disekolah, memberikan ruang dialog, diskusi dan debat, secara tidak langsung membiasakan peserta didik untuk menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi tersebut di dalam masyarakat. Oleh sebab itu pemahaman materi demokrasi secara tidak langsung dapat membangun budaya demokrasi bagi peserta didik.

2. Pengaruh lingkungan keluarga terhadap tingkat partisipasi politik politik siswa sebagai pemilih pemula di SMA Negeri Kabupaten Bantul

Sama halnya dengan pemahaman materi demokrasi yang di dapat dalam pembelajaran di sekolah lingkungan keluarga juga dapat dijadikan agen sosialisasi pertama yang dalam memberikan orientasi, motivasi dan kebiasaan-kebiasaan dan menjadi pendidikan politik awal bagi pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya. Lingkungan keluarga memiliki peranan penting untuk memberikan

pendidikan politik terutama adalah peran orang tua. Melalui proses pemahaman dan pembelajaran yang diberikan orang tua tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam kehidupan agar pemilih pemula memiliki kesadaran sedini mungkin untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Keluarga merupakan lembaga terkecil yang berperan dalam membentuk karakter individu, oleh sebab itu pandangan politik dari keluarga menjadi penting untuk membentuk individu yang berkualitas sehingga dapat berperan bagi kemajuan bangsa dan negara. Oleh sebab itu lingkungan keluarga terutama peran orang tua untuk memberikan kesadaran politik bagi pemilih pemula menjadi hal utama dalam memberikan arahan dan peran sebagai individu terutama untuk menjadi pemilih pemula diberikan dan disampaikan secara baik.

3. Pengaruh pemahaman materi demokrasi dan lingkungan keluarga terhadap tingkat partisipasi politik politik siswa sebagai pemilih pemula di SMA Negeri Kabupaten Bantul

Pemahaman materi demokrasi dan lingkungan keluarga diasumsikan dapat memberikan pengaruh secara signifikan dalam partisipasi politik pemilih pemula. Hal ini dikarenakan pemahaman materi demokrasi dan lingkungan keluarga pada dasarnya dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman dengan tujuan untuk mendidik dan mengajarkan pemilih pemula agar berperilaku dan bersikap secara positif baik itu di lingkungan persekolahan maupun di lingkungan masyarakat

Berikut kerangka fikir pengaruh pemahaman materi demokrasi dan lingkungan keluarga terhadap tingkat partisipasi politik politik siswa sebagai pemilih pemula di SMA Negeri Kabupaten Bantul.

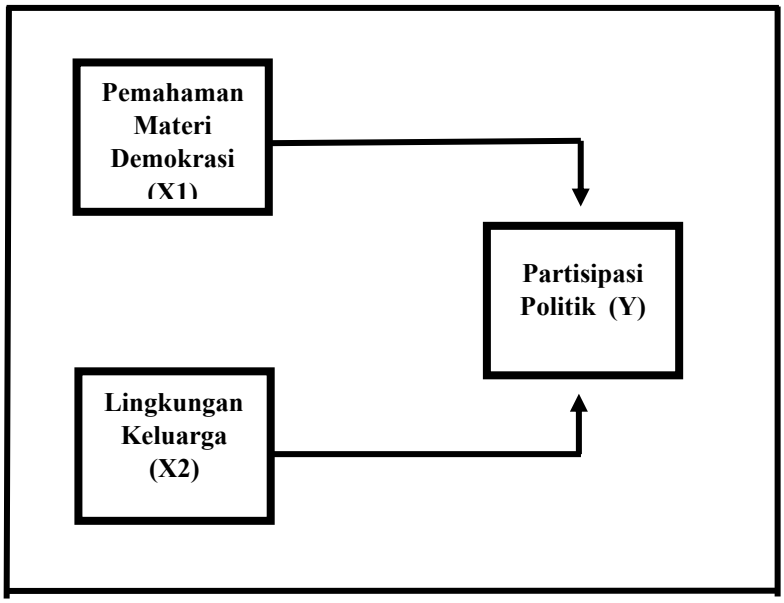

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian

Penjelasan pada gambar tersebut peneliti menggambarkan bahwa kedua variabel yaitu pemahaman materi demokrasi dan lingkungan keluarga yang mendasari partisipasi politik. Hal ini disebabkan materi pemahaman demokrasi dan lingkungan keluarga dianggap mampu memberikan pengaruh terhadap partisipasi politik pemilih pemula. Melalui materi demokrasi yang ada di dalam pembelajaran dan lingkungan keluarga yang dapat membentuk pemilih pemula dianggap dapat memberikan dampak pada partisiasi politik. Oleh sebab itu kedua komponen tersebut diasumsikan dapat memberikan pengaruh terhadap partisipasi politik terutama kepada pemilih pemula, maka dari itu penting bagi sekolah dan keluarga untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kodua komponen komponen variabel tersebut terhadap partisipasi politik pemilih pemula.

D. Hipotesis Penelitian

Menurut pendapat Creswell (2010:197) hipotesis dapat diartikan sebagai prediksi peneliti yang berupa pemikiran berdasarkan angka populasi yang didasari data sampel penelitian. Pada uji hipotesis juga menerapkan prosedur statistik dengan mendeskripsikan dugaan peneliti di dalam penelitiannya.

Di dalam penelitian ini adapun hipotesis peneliti yang dapat diambil adalah:

1. Ada pengaruh pemahaman materi demokrasi terhadap tingkat partisipasi politik siswa di SMA Negeri Kabupaten Bantul
2. Ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap tingkat partisipasi politik politik siswa di SMA Negeri Kabupaten Bantul.
3. Terdapat pengaruh pemahaman materi demokrasi dan lingkungan keluarga terhadap tingkat partisipasi politik politik siswa di SMA Negeri Kabupaten Bantul.